

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SOLOK**

THESIS

DISUSUN OLEH

**WINDEL VERIWADIAT
BP: 0821211037**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**Pembimbing:
Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA
Dr. Yuslim, SH., MH**

**MAGISTER HUKUM
PROGRAM REGULER MANDIRI PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2016**

THE IMPLEMENTATION OF THE LOCAL REGULATION No. 1 OF 2008 ON LOCAL GOVERNMENT IN THE PUBLIC SERVICES IN SOLOK

(Windel Veriwadiat, 0821211037, Law Graduate Program
Andalas University, 116 pages, 2016)

ABSTRACT

Reformation gives a hope to the public services that is more fair and be spread evenly. Various changes in the public service are already in progress in the reformation era. To respond to the matter, the government of Solok has made the local regulation no. 1 of 2008 on ethics, which is the purpose is to materialize the development of organizational culture and the good, ethical, accountability and transparency governmental activity in order to achieve a good local governance in Solok. The society always demand a qualified public services from the government, whereas rights and obligations of the society in the public service is still unclear. The mechanism in delivering complaints and grievances to the government also does not meet the standards of public service. The research problems are; how is the implementation of the local regulation no. 1 of 2008 on the public services in Solok and what are the obstacles of the local regulation no. 1 of 2008 on the public services in Solok?. The writing approach of this research is a sociological judicial approach (empirical), it uses qualitative descriptive design, the data collection technique: documentation study, interviews and observations and the data processing; editing, coding with the qualitative data analysis. The results of this research show that 1) The implementation of the local regulation no. 1 of 2008 on the public services in Solok is the efforts of the government administration in simplifying public services that the government administrators have obeyed the ethical norms of local government as stipulated in Article 10, so that a whole society can receive the rights as meant in Article 20, the local regulation no. 1 of 2008. 2) The procedures performed in the implementation of the local regulation no. 1 of 2008 on the public services in Solok are implemented in accordance with the regulations of the mayor of Solok no. 58 of 2014 about the standard operating procedures in service and licensing office. Each SOP has its own procedures in accordance with the administrative procedures of the government of Solok, which means that the services provided have been in accordance with the principle of public service as stipulated in Article 4 of the law no. 25 of 2009 so that the givers and receivers of public services are satisfied with the service. The obstacles to the local regulation no. 1 of 2008 on the public services are 1) There is still legal culture that people are lazy to manage the population administration of their own, there are still people who think that the public service will go through a lot of tables, convoluted services and taking a lot of time. 2) The challenge is seen in the legal structure that in the mastery of information technology officers is still low and the lack of computers. 3) The substance of the law challenge is that the officers still prioritize the personal, the cronies, and the group interests and there is still favoritism in the public services.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SOLOK**

(Windel Veriwadiat, 0821211037, Program Magister Hukum
Universitas Andalas, 116 hlm 2016)

ABSTRAK

Reformasi memberikan harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Berbagai perubahan dalam pelayanan publik memang sudah berlangsung di era reformasi ini. Untuk merespon hal tersebut maka pemerintah Kota Solok telah melahirkan Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika, tujuannya untuk mewujudkan pengembangan budaya organisasi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, etis, akuntabel, transparansi dalam rangka mewujudkan *good lokal governance* di Kota Solok. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintahan, hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik selama ini belum jelas. Mekanisme penyampaian keluhan dan komplain dan berbagai ketidakpuasan kepada pemerintah juga belum sesuai dengan standar pelayanan publik. Masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2008 dalam pelayanan publik di Kota Solok dan Apa saja kendala-kendala dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2008 dalam pelayanan publik di Kota Solok? Pendekatan penulisan yaitu pendekatan yuridis sosiologis (empiris), tipe penulisan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data: studi dokumentasi, wawancara dan observasi dan pengolahan data: editing, coding dan analisis data dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pelayanan Publik di Kota Solok adalah adanya upaya dari penyelenggara pemerintahan untuk menyederhanakan pelayanan publik, penyelenggara pemerintahan telah mentaati norma etika pemerintahan daerah yang tertuang dalam pasal 10, sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat menerima haknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Perda Nomor 1 Tahun 2008. 2). Prosedur yang dilakukan dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2008 dalam pelayanan publik di Kota Solok diantaranya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada kantor pelayanan dan perizinan. Masing-masing SOP memiliki prosedur tersendiri sesuai dengan prosedur administrasi pemerintah Kota Solok, artinya pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan asas pelayanan publik yang terdapat pada pasal 4 UU Nomor 25 tahun 2009 sehingga pemberi dan penerima pelayanan publik merasa puas dengan pelayanan tersebut. Kendala dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pelayanan publik. 1). Masih ada budaya hukum (*Legal Culture*) masyarakat yang malas mengurus administrasi kependudukan yang harus dimilikinya, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa dalam melakukan pelayanan publik akan melewati banyak meja, pelayanan yang berbelit-belit dan terlalu lama. 2). Tantangan struktur hukum terlihat pada penguasaan teknologi informatika aparatur yang masih rendah dan terbatasnya sarana komputer dan 3) tantangan substansi hukum masih adanya aparatur yang mendahulukan kepentingan pribadi, kroni dan kelompok serta masih pilih kasih dalam melakukan pelayanan publik.